



BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 SAMPAI TRIWULAN I

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa rencana pembangunan telah dilaksanakan secara konsisten serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa evaluasi hasil RKPD dilakukan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil evaluasi dan Renja-PD yang disampaikan oleh seluruh perangkat daerah.

Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2015 adalah untuk :

- a. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran SKPD Tahun 2016.
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur s.d. Triwulan I Tahun 2015.
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 s.d. Triwulan I Tahun 2015.
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2015.



- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur s.d. Triwulan I Tahun 2016 digunakan sebagai :

- a. Masukan untuk penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
- b. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Indikator penilaian kinerja SKPD; dan
- d. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

2.1. TUJUAN DAN SASARAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (RKPD) TAHUN 2016

Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja SKPD yang bersangkutan pada Triwulan I Tahun 2016 maupun capaian Renstra SKPD masing-masing SKPD s.d. Triwulan I Tahun 2016, juga dilakukan evaluasi hasil Renja

Sumber data dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Renstra SKPD Tahun 2015-2018, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, Renja SKPD Tahun 2016, DPA SKPD Tahun 2016, dan laporan Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2016.

Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan membandingkan judul, indikator, target, pagu setiap program/kegiatan pada setiap dokumen perencanaan maupun dokumen anggaran. Sedangkan evaluasi hasil dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Renstra/Renja SKPD dengan realisasi pelaksanaan DPA SKPD.



Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel, 2.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prov. Kaltim tahun 2015

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,28;• Meningkatnya angka melek huruf menjadi 98,60%;• Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 11 tahun;• Meningkatnya angka harapan hidup menjadi 72 tahun; dan• Meningkatnya pendapatan perkapita menjadi Rp 50,65 juta.
2.	Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 5,35%• Menurunnya tingkat pengangguran menjadi 6,50%• Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat paritas daya beli Rp.751.237,- dengan tingkat inflasi sebesar 4,0±1; dan• Menurunnya Indeks Gini pada skala 0,33;
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar:<ul style="list-style-type: none">a. 2,5-2,9 persen (Laju pertumbuhan ekonomi migas),b. 7,7-8,3 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas), danc. 7,6-8,2 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara);• Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah sebesar 8,00%;



No.	Tujuan	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none">• Tercapainya swasembada pangan sebesar 82,01%;• Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 1,62%;
4.	Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,50.
5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,30 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;• Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 80 (sangat baik);• Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 74,00 (B+) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah "sangat tinggi".
6.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 80,19; dan• Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dari 1500 ton CO₂/US \$juta PDRB (tahun 2013) menjadi 1.350 ton CO₂/US \$ juta PDRB (tahun 2016)

Sumber : Pergub No 30 Tahun 2015 RKPD Prov. Kaltim Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, SKPD berkewajiban mendukung perwujudan seluruh tujuan pembangunan dimaksud. Di samping itu, secara khusus bertanggung jawab mewujudkan tujuan menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dengan sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,50. Oleh karena itu, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan menjadi amatlah penting. Beberapa hal yang terkait dengan tujuan pembangunan tersebut antara lain:

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim



Pendidikan disadari memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, Provinsi Kalimantan Timur telah mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun demikian, kita harus tetap meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting dalam pencapaian pembangunan daerah. Mutu kesehatan masyarakat yang baik atau tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Peningkatan ekonomi daerah dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi Hijau dimaknai dengan perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan serta hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional



sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya.

Tujuan 4 : Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Keberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi.

Tujuan 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukungan



lingkungannya. Tersedianya berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan usaha kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah, namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Pengendalian dan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan rencana pembangunan akan menjamin bahwa rencana pembangunan telah dilaksanakan secara terarah sehingga terwujud penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Evaluasi hasil akan memastikan bahwa target kinerja pada setiap program/kegiatan telah dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

2.2. EVALUASI DAN HASIL RKPD TAHUN 2016 DAN RENJA - PD (SAMPAI TRIWULAN I)

RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

Renja-PD disusun dengan berpedoman pada Renstra-PD dan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, serta menyesuaikan dengan kebijakan dalam RKPD. Renja-PD diverifikasi oleh Bappeda, oleh karena itu judul program, judul kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu Renja-PD harus sama dengan Renja-PD.

Sedangkan APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang disusun berdasarkan RKPD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan RKPD memiliki



hubungan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satu hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD.

2.2.1. TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA DAN RENJA-PD TAHUN 2016

Capaian kinerja Renstra-PD diperoleh dari pelaksanaan Renja-PD setiap tahun. Oleh karena itu konsistensi pelaksanaan Renstra-PD ke dalam Renja-PD sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Renstra-PD.

Table 2.1
Capaian Kinerja Renstra-PD dan RENJA-PD
SKPD - Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

No. Urut	Judul Program	Capaian s.d. Triwulan I/2016 (%)			
		Renja 2016		Renstra (Thn ke-3)	
		K	Rp	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bidang PSDM				
1	Dinas Pendidikan	12,04	4,95	30,93	30,61
2	Dinas Kesehatan	11,98	3,82	35,61	28,70
3	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda	10,00	2,86	52,54	56,73
4	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan	5,15	3,90	27,16	18,76
5	RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam	5,02	5,02	17,93	30,40
6	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	10,41	4,61	52,19	24,75
7	Dinas Sosial	12,00	6,57	42,81	31,40
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8,12	5,90	28,95	25,44
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	18,70	5,53	51,03	37,75
10	Biro Sosial	3,50	11,18	50,10	28,16
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10,16	10,22	39,58	43,19
12	Badan Perpustakaan Daerah	14,01	7,64	43,55	41,88
	Bidang Pemerintahan dan Aparatur				
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19,03	10,94	50,02	47,66



No. Urut	Judul Program	Capaian s.d. Triwulan I/2016 (%)			
		Renja 2016		Renstra (Thn ke-3)	
		K	Rp	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal	4,62	29,82	46,02	55,92
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,24	6,22	42,90	25,63
4	Satuan Polisi Pamong Praja	8,47	6,88	49,87	53,76
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,44	6,38	38,70	26,15
6	Biro Umum	2,60	44,67	80,16	37,77
7	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0,98	3,96	51,68	28,91
8	Biro Hukum			85,71	39,24
9	Biro Organisasi	3,60	5,01	66,66	31,63
10	Biro Pemerintahan Umum	8,63	26,66	51,49	49,46
11	Biro Keuangan	8,21	4,60	39,91	29,74
12	Biro Pembangunan Daerah	-	4,76	57,50	58,97
13	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	20,00	4,24	75,92	39,45
14	Biro Perlengkapan	19,76	11,14	52,50	30,03
15	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	24,73	23,74	99,17	28,83
16	Sekretariat DPRD	3,80	4,85	75,49	24,06
17	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,71	7,86	43,90	28,24
18	Inspektorat	24,36	15,48	56,14	43,22
19	Kantor Penghubung	3,72	8,41	69,84	31,87
20	Badan Pendidikan dan Pelatihan	17,04	9,00	39,72	25,88
21	Badan Kepegawaian Daerah	24,75	8,53	67,10	33,20
22	Badan Arsip Daerah	12,41	5,58	77,21	28,20
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,29	4,92	41,93	28,92
24	Sekretariat KPID	3,76	3,54	36,38	28,41
	Bidang PPW				
1	Dinas Pekerjaan Umum		0,68	42,14	37,41
2	Dinas Perhubungan	7,17	5,15	49,78	32,26
	Bidang Ekonomi				
1	Badan Lingkungan Hidup	10,90	4,97	56,35	33,92
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	10,56	6,11	66,39	42,25
3	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	11,84	5,07	36,66	23,85
4	Biro Perekonomian	13,18	3,75	30,42	42,48
5	Dinas Pendapatan Daerah	22,97	11,12	28,99	29,35
6	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	3,09	3,72	52,90	30,00
7	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	18,02	5,22	48,72	34,58



No. Urut	Judul Program	Capaian s.d. Triwulan I/2016 (%)			
		Renja 2016		Renstra (Thn ke-3)	
		K	Rp	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Dinas Perkebunan	5,23	4,21	42,26	28,58
9	Dinas Peternakan	14,11	7,70	42,45	43,35
10	Dinas Kehutanan	6,90	4,66	33,87	32,75
11	Dinas Pertambangan dan Energi	20,52	17,39	51,85	37,33
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6,82	8,64	43,83	51,48
13	Dinas Kelautan Dan Perikanan	14,83	6,09	73,65	41,28
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		10,61	8,47	50,36	35,17

Sumber : Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Renja-Pd
Triwulan I Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2.1. di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- Rata-rata capaian kegiatan Renja-PD seluruh SKPD pada Triwulan I Tahun 2016 adalah 10,61% untuk pencapaian target output dan 8,47% untuk pencapaian kinerja keuangan.
- Rata-rata capaian kegiatan Renstra-PD seluruh SKPD Bidang PSDM pada sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 adalah 50,36% untuk pencapaian target output dan 35,17% untuk pencapaian kinerja keuangan.
- Rata-rata capaian kinerja output Renstra yang paling rendah adalah RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam yaitu 17,93% dan yang tertinggi adalah RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda yaitu 52,54%.
- Rata-rata capaian kinerja keuangan Renstra yang paling rendah adalah RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yaitu 18,76% dan yang tertinggi adalah RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda yaitu 56,73%.
- Rata-rata capaian kinerja output Renstra yang paling rendah adalah Sekretariat KPID yaitu 36,38% dan yang tertinggi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yaitu 99,17%. Tingginya capaian kinerja output pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI



adalah disebabkan indikator dan target kinerja kegiatannya belum bisa diukur dengan mudah karena dalam bentuk persentase.

- f. Rata-rata capaian kinerja keuangan Renstra yang paling rendah adalah Sekretariat DPRD yaitu 24,06% dan yang tertinggi adalah Biro Pembangunan Daerah yaitu 58,97%.
- g. Rata-rata capaian kinerja output Renstra yang paling rendah adalah Dinas Pendapatan Daerah yaitu 28,99% dan yang tertinggi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu 73,65%.
- h. Rata-rata capaian kinerja keuangan Renstra yang paling rendah adalah Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah yaitu 23,85% dan yang tertinggi adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu 51,48%.
- i. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Pagu Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dalam RKPD sejumlah Rp.4.000.000,- dan dalam APBD sejumlah Rp. 431.200.000,- atau 10.780%, realisasi pada triwulan I sejumlah Rp.93.600.000,- atau 2.340% dibanding pagu RKPD tahun 2014.

2.2.2. FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.

Salah satu hasil dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi adalah identifikasi terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja. Informasi tentang hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang.

- I. Faktor pendorong yang dimuat dalam laporan yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - 1. Komitmen pimpinan dan motivasi pegawai
 - 2. Ketersediaan anggaran APBD maupun APBN
 - 3. Sarana teknologi dan informasi yang memadai
 - 4. Sarana dan prasarana yang memadai
 - 5. Akreditasi layanan



6. Tersedianya anggaran.
 7. Pembenahan atau perbaikan indikator kinerja program/kegiatan dan satuan target.
 8. Tersedianya SDM yang berkualitas ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
 9. Anggaran yang disyahkan diawal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat
 10. Program dan kegiatan disesuaikan dengan RENSTRA 2013 - 2018.
 11. Kegiatan sesuai dengan Renstra dan Renja SKPD
 12. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 13. Terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/ Kegiatan tersebut
 14. Adanya jaminan bahan baku untuk mendukung kelancaran kegiatan
 15. Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 16. Kegiatan yang dilaksanakan SKPD merupakan program nasional
 17. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan
 18. Anggaran kas serta jadwal pelaksanaan kegiatan tersusun dengan baik, menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulan
 19. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu dari yang direncanakan
 20. Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja dilapangan
- II. Faktor penghambat yang dirasakan dalam pelaksanaan program/ kegiatan adalah:
1. Kualifikasi dan Kuantitas SDM yang belum memadai
 2. Persepsi Stake holder yang kurang tepat terhadap konsep pembangunan kesehatan
 3. Belum terstandarisasinya pelaksanaan kegiatan (spt ISO 9001 : 2008)



4. Kerjasama lintas program yang belum tercapai
5. Kebijakan yang sering berubah-ubah khususnya dari segi penganggaran
6. Laporan dari bidang terkait Program dan kegiatan lambat dalam memberikan hasil yang telah dicapai
7. Ketersediaan anggaran yang kurang memadai.
8. Sumber daya manusia yang kurang terampil.
9. Indikator kinerja program/kegiatan pada renstra targetnya masih banyak yang tidak terukur (satuan target memakai tahun).
10. Berkas usulan PAW yang disampaikan kepada Gubernur tidak lengkap dan tidak sesuai yang dipersyaratkan.
11. SKPD dan kabupaten/kota terlambat menyampaikan laporan Program/Kegiatan yang dikelola sehingga penyusunan LPPD Provinsi terhambat.
12. Data yang disampaikan belum disertai data pendukung yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena sangat penting untuk mengisi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri dari 3 form isian.
13. Masih rendahnya partisipasi pemilih dan tingginya angka golput di Provinsi Kaltim dengan tingkat partisipasi politik 62%.
14. Tahun 2014 dan 2015 kewenangan penyelesaian permasalahan pertanahan berada di Kabupaten/Kota namun kasus pertanahan yang ditangani masih ditangani provinsi.
15. Tupoksi yang belum jelas.
16. Minimnya dana untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota.
17. Adanya beberapa kewenangan yang berubah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Validasi data yang berhubungan dengan kegiatan di Kab/Kota masih berjalan kurang optimal
19. Pelaksanaan kegiatan harus menunggu instruksi dari Pusat.



20. Belum adanya komitmen yang kuat bagi pelaksana kegiatan terutama yang ada di Bidang Teknis untuk melaksanakan kegiatan berorientasi hasil berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, dan tidak berpedoman pada schedule yang telah dibuat.
21. Sistem lelang dan ULP yang masih belum sesuai dengan biaya yang tersedia
22. Perubahan kajian dari 1 (satu) kajian menjadi 3 (tiga) kajian yang telah diselaraskan dengan renja dan dokumen pelaksanaan
23. Pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan.
24. Kurangnya kapasitas SDM
25. Masih rendahnya produktivitas beberapa komoditas perkebunan bila dibandingkan dengan potensi produksinya dan adanya moratorium perizinan untuk pembangunan usaha perkebunan serta alokasi dana pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak tersedia/ anggarannya terlalu kecil
 - 1) Perubahan regulasi dan revisi kegiatan pada Bidang-bidang
 - 2) Masyarakat yang lambat menerima inovasi peningkatan ekonomi
 - 3) Adanya musim kemarau yang menghambat kegiatan
 - 4) Pelaksanaan kegiatan tidak menepati jadwal yang telah disepakati sehingga realisasi mundur dari jadwal pelaksanaan
 - 5) Pihak ketiga yang tidak merealisasikan kegiatan sesuai kesepakatan sehingga mengganggu kegiatan operasional dilapangan
 - 6) kegiatan fisik maupun non fisik yang belum memproses pencairan dana akan tetapi realisasi fisiknya sudah melebihi realisasi keuangan
 - 7) Program / Kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan
 - 8) Alokasi anggaran yang tidak maksimal
 - 9) Pembebasan Tanah tidak dapat dilaksanakan dengan cepat



Hasil pengendalian dan evaluasi yang diperoleh menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan Renja SKPD Tahun 2016. Dimana seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan melaporkannya secara tertib kepada kepala daerah melalui Bappeda Provinsi sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan. Bidang di lingkungan Bappeda menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi untuk memastikan terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.